AKUNTABEL 18 (2), 2021 295-302
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL

Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah

Lutfa Nadia[1], Dekeng Setyo Budiarto[2*]
Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta.
[1]Email: farwanawa@gmail.com
[*2]Email: dekengsb@upy.ac.id

Abstrak

Pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian penting dalam tatakelola pemerintah daerah terutama berkaitan dengan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, sistem pengendalian internal dan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai puskesmas di Kabupaten Bantul yang bertugas mengelola barang atau aset milik daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 63 pegawai puskesmas. Pengujian data digunakan analisis validitas dan reliabilitas sedangkan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur berpengaruh negatif terhadap pengelolaan barang milik daerah sedangkan kepatuhan pada regulasi, sistem pengendalian internal, sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah secara akuntabel dan transparan agar kualitas layanan dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Kualitas aparatur daerah; kepatuhan pada regulasi; sistem pengendalian internal; sistem informasi

The importance of information systems for regional property management

Abstract

The management of the regional property is an integral part of local government governance, especially concerning serving the community. This study aims to determine the effect of the quality of the regional apparatus, compliance with regulations, internal control systems, and information systems on the management of the regional property. The population of this research is all employees of the Puskesmas in Bantul Regency who are in charge of managing goods or assets belonging to the region. The sampling technique used purposive sampling with specific criteria according to the research objectives. Data were collected by distributing questionnaires to 63 Puskesmas employees. The data test used validity and reliability analysis, while hypothesis testing used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the quality of the apparatus has a negative effect on the management of the regional property. In contrast, compliance with regulations, internal control systems, and information systems positively affects regional property management. This research has implications for local governments to manage regional property in an accountable and transparent manner to improve service quality.

Keywords:*Quality of regional apparatus; compliance with regulations; internal control systems and information systems*

PENDAHULUAN

Barang atau aset merupakan sumber ekonomi penting yang diperlukan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan puskesmas (Arnan, 2018). Pengelolaan aset dengan benar akan mendorong aparatur pemerintah menjalankan fungsinya secara optimal. Pengelolaan aset yang baik dan transparan akan memaksimalkan fungsi instansi sebagai pemberi layanan pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh agar penyelenggara pemerintah daerah dapat mengelola aset secara transparan, efisien dan akuntabel sehingga kualitas layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan (Hidayati, 2016).

Penelitian ini menarik karena: (1) Hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul nomor 28/R/XVII.YOG/05/2019, menjelaskan bahwa didapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan catatan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengeleloaan keuangan negara terutama yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah (www.bantuklkab.go.id), (2) melengkapi penelitian yang dilakukan oleh (Azhar, Darwanis, & Abdullah, 2013) dengan menambah sistem pengendalian internal sebagai variabel independen karena dapat mempengaruhi tatakelola aset (Astini, 2018), (3) tatakelola aset yang dilaksanakan yang sesuai pada regulasi pemerintah akan mencapai good governance, salah satu permasalahan dalam tatakelola aset daerah adalah kesalahan administrasi ketika melakukan inventarisasi aset (Hidayat, Juniarsih, Chotib, & Mardiansyah, 2017). (4) pengelolaan barang milik daerah akan berhasil jika diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indah, Abdullah, Junita, & Fahlevi, 2017). (5) adanya inkonsistensi riset yang menyatakan kualitas aparatur daerah dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen aset (Astini 2018; Belo et al., 2013; Azhar et al., 2013) sedangkan penelitian Darno (2012); Belo et al. (2013); Sulistiawati, (2016); Niu et al. (2017) bahwa sistem informasi merupakan media penting dalam memudahkan pengelolaan barang dan menghasilkan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Tinjauan pustaka

Teori keagenan yang dijelaskan oleh Jansen dan Meckling (1976) merupakan perjanjian pemerintah sebagai principal dengan agen sebagai pengambil keputusan. Menurut Zelmiyati (2016) organisasi sektor publik memiliki hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran antara legislatif dengan eksekutif, pusat dengan daerah, daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kemudian SKPD dengan unit pelaksana teknis (UPT). Penelitian ini menggunakan teori keagenan dengan mengkaji hubungan antara agent (pengelola barang milik daerah) dengan principal adalah masyarakat. Masalah yang muncul dalam teori ini adalah perbedaan kepentingan antara agent dengan principal. Oleh karena itu diperlukan identifikasi berbagai faktor dalam pengelolaan barang milik daerah agar pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kurangnya pengawasan dari pihak principal akan dapat menimbulkan berbagai penyelewengan atau fraud yang dilakukan oleh agen (Budiarto, Setyaningrum, & Sari, 2020; Muna & Haris, 2018).

Pengelolaan aset daerah terutama pada puskesmas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum daerah (BLUD) yang diatur pada Permendagri No. 79 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, barang atau aset daerah merupakan semua aset yang dibeli atau diperoleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset tetap dan persediaan merupakan bagian dari kegiatan operasional puskesmas. Menurut (Kolinug et al., 2015) prosedur pengeloaan aset tetap merupakan suatu siklus yang saling terkait satu sama lain dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Akuntabilitas atau tatakelola aset daerah adalah suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah dalam terutama berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi akan mencapai visi dan misinya jika memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pegawai dikatakan memiliki kompetensi jika memiliki pengetahuan dan keahlian dalam tatakelola aset daerah (Niu et al., 2017). Kualitas aparatur daerah dapat diketahui berdasarkan ketrampilan, kualitas pendidikan, banyaknya pelatihan serta kemahiran dalam mengelola aset sesuai peraturan perundangan (Syahputra et al, 2018). Pengelolaan barang milik daerah memerlukan aparatur daerah yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang seharusnya selaras dengan tupoksinya. Sesuai dengan UU No. 1 (2004) bahwa pengelola aset daerah wajib mengelola barang dengan bijak (Astini,

2018). Tingginya kualitas aparatur daerah akan tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen aset yang bisa diperoleh melalui pelatihan, pembinaan dan evaluasi (Syahputra et al, 2018). Aparatur daerah memiliki tanggungjawab dan wajib melakukan pengelolaan barang dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan (Azhar, 2013). Oleh karena itu kualitas aparatur yang baik akan mendorong dipatuhinya standar penengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku (Fathiyah, 2018).

Berdasarkan temuan riset diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah

Pemerintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintahan yang didalamnya terdapat organisasi perangkat daerah dan pelaksana perangkat daerah merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari urusan kenegaraan. Organisasi perangkat daerah termasuk didalamnya puskesmas yang merupakan bagian penting dari pemerintah daerah memiliki peranan yang signifikan dalam pelayanan masyarakat (http://djkn.kemenkeu.go.id/). Puskesmas sebagai badan layanan umum pengelola aset merupakan media untuk optimalisasi penerimaan negara. Dalam prakteknya, puskemas dapat membelanjakan dananya baik menjadi aset maupun persediaan guna mendukung tercapainya pelayanan kepada masyarakat (PP No. 23 tahun 2005). Regulasi atau aturan diperlukan dalam proses pengaturan segala kegiatan dalam organisasi yang didalamnya terdapat sumberdaya manusia (Subrata et al, 2018). Kepatuhan regulasi dapat mengurangi kepentingan atau kekuatan politik dari pihak yang berkepentingan (puskesmas) sebagai demand dan pemerintah sebagai supply (Stigler, 2012). Scott (2015) menjelaskan terdapat dua jenis teori regulasi yaitu teori kepentingan publik dan teori kelompok kepentingan. Teori kepentingan publik terjadi jika badan regulator (pemerintah) melakukan tindakan terbaik untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat umum, sedangkan teori kepentingan terjadi jika terdapat negosiasi antara konstituan akuntansi dalam penyusunan standar akuntansi. Oleh karena itu peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_2: Kepatuhan pada regulasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang dilakukan keseluruhan komponen di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya SPIP meliputi metode dan kebijakan yang terintegrasi dalam pemerintah untuk menggunakan aset negara dalam menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan melalui SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu sistem yang diimplementasikan pada lingkungan organisasi pemerintahan termasuk puskesmas, peran sistem ini sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud dan memperbaiki tata kelola organisasi (Sari, 2014; Budiarto et al., 2020; Muna & Haris, 2018). Hasil riset Subrata et al. (2018) dan Astini (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan dampak pada pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah

Sistem informasi merupakan komponen yang saling berkaitan mulai dari mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kembali dalam suatu organisasi (Yunita & Devitra 2017). Sistem informasi merupakan jaringan sistem yang digunakan dalam mengolah data, menginput data, menyimpan informasi data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami banyak pihak dalam pelaksanaan pengelolaannya (Sulistiawati, 2016). Sistem informasi dapat menggantikan pekerjaan dengan sistem elektronik agar informasi lebih cepat dan akurat (Belo et al (2013). Sistem elektronik yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah pada puskesmas di kabupaten Bantul adalah SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Aset Keuangan) dan SIMPERSADA (Sistem Informasi Persediaan) Kedua alikasi ini diimplementasikan agar mempermudah pencatatan serta pelaporan aset puskesmas guna mendapatkan informasi yang cepat akurat dan memadai. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (www.bantulkab.go.id)

Pemanfaatan sistem informasi mempengaruhi keakuratan dan ketepatan dalam memperoleh informasi sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat tercipta (Subrata et al.,2018). Sistem informasi

juga dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan pemeriksaan dalam melakukan controling terhadap kinerja instansi pemerintah (Syahputra et al.,2018). Penggunaan aplikasi yang memadai akan meningkatkan keakuratan kinerja puskesmas dalam pengelolaan barang (Yunita dan Devitra,2017). Penelitian Bharranti, (2017); Arnan (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi memiliki dampak secara langsung pada pengeloaan barang milik daerah. Kualitas laporan dan kecepatan informasi dapat dicapai dengan adanya sistem informasi yang baik dan memadai sehingga pengelolaan aset terutama yang dimiliki oleh puskesmas akan menjadi lebih handal dan dapat dipercaya (Azhar, 2013). Berdasarkan beberapa kajian dan temuan diatas maka peneliti dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_4: Sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah

METODE

Populasi pada riset ini adalah aparatur daerah atau pegawai puskesmas yang terlibat dalam tatakelola aset daerah yaitu: kepala puskesmas, kepala tata usaha, bendahara puskesmas, pejabat pengadaan barang, pengelolaan barang persediaan, pengurus barang, pengguna barang, dan pembuat neraca. Obyek penelitian adalah 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling dengan kriteria pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan aset. Riset ini dilakukan selama 7 bulan (Desember 2019 sampai dengan Juni 2020) dengan menyebarkan 216 Kuisoner, karena Pandemi Covid-19 maka kuesioner yang kembali dan dapat digunakan hanya 63.

Seluruh instrumen penelitian menggunakan skala likert dengan 5 pengukuran yaitu (1) Sama Sekali Belum (2) Sebagian Kecil (3) Netral (4) Sebagian Besar (5) Sudah Sepenuhnya. Kualitas aparatur daerah diukur dengan angket yang dikembangkan oleh (Oktaviana, 2010). Variabel ini menggunakan 4 indikator pertanyaan tentang pendidikan, pelatihan, pengembangan keahlian dan pengalaman. Selanjutnya peneliti menggunakan pengukuran variabel kepatuhan pada regulasi dengan 4 indikator pertanyaan tentang pemahaman pengelola BMD pada ketentuan hukum serta respon pengelola BMD pada ketentuan hukum (Oktaviana, 2010).

Sitem Pengendalian Internal ini diukur dengan 6 indikator pertanyaan yaitu tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian dan Informasi dan Komunikasi (Pratiwi, 2012).

Sistem Informasi diukur dengan 6 indikator pertanyaan yaitu tentang fasilitas sistem informasi yang tersedia dan pemahaman penggunaan sistem informasi (Oktaviana, 2010). Pengelolaan barang milik daerah diukur dengan menggunakan 10 pertanyaan yang merujuk pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang mengambil penjelasan tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berkaitan dengan penerapan pengelolaan barang milik daerah yang tepat dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 mengakibatkan waktu yang digunakan untuk penelitian menjadi lebih panjang yaitu 7 bulan. Hasil penyebaran kuesioner kemudian dianalisis berdasarkan deskripsi responden (Tabel. 1). Selanjutnya dilakukan pengujian data dengan uji validitas menggunakan pearson's correlation. Hasil uji validitas menghasilkan p value < 0,05 pada seluruh instrumen sehingga dapat disimpulkan bahwa intstrumen yang digunakan valid. Hasil pengujian instrumen pada variabel kompetensi aparatur ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas seluruh variabel dengan cronbach's alpha.

Hasil analisis meperlihatkan bahwa kualitas SDM berdampak negatif pada pengelelolaan aset daerah. Hasil riset ini membuktikan bahwa kualitas SDM berbanding terbalik dengan praktik tatakelola aset daerah, meskipun SDM memiliki kemampuan yang terbatas, namun tata kelola aset tetap optimal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa yang terjadi, pengelola barang di Puskesmas berlatar pendidikan sebagai dokter, perawat, kesehatan masyarakat, dan fisioterapis. Meskipun terdapat Asimetri latar belakang pendidikan pada manajemen aset, namun sistem pengelolaan tetap berjalan dengan baik. Meskipun pengalaman dan pengetahuan belum memadai namun kualitas dapat ditingkatkan secara continue dengan pendampingan, dan evaluasi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu meskipun aparatur daerah tidak memiliki kompetensi akuntansi dalam pengelolaan barang

milik daerah, mereka dapat mewujudkan sistem pengelolaan yang baik karena adanya pendampingan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada regulasi merupakan hal yang sangat mendasar untuk mewujudkan manajemen aset daerah secara tepat serta akurat (Azhar et al., 2013) Pemahaman dan respon yang baik dari pengelola barang untuk mengatahui dan update informasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah dapat meningkatkan akuntabilitas (Sulistiawati, 2016). Peran pemerintah daerah atau penyedia laporan keuangan dan pertanggungjawaban belanja harus konsisten dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen aset daerah, hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu regulasi (Nancy, 2015).

Tabel 1. Karakteristik responden

Jenis Kelamin	Laki-Laki	15
	Perempuan	48
Jabatan	Kepala Puskesmas	3
	Bendahara Puskesmas	2
	Pejabat Pengadaan Barang	2
	Pengelola Barang Persediaan	20
	Pengurus Barang (Aset)	20
	Pengguna Barang	2
	Pembuat Neraca	14
Pendidikan Terakhir	SLTA/Sederajat	22
	Diploma	27
	Strata 1 (Sarjana)	13
	Strata 2 (Master)	1
Pangkat/Golongan	Golongan IV	4
	Golongan III	31
	Golongan II	9
	Non PNS	19
Lama Bekerja	1-5 Tahun	22
	6-10 Tahun	19
	11-15 Tahun	9
	16-20 Tahun	2
	≥ 21 Tahun	11
Pelatihan yang pernah diikuti	Pernah	15
	Minim Sekali	6
	Tidak Pernah	42

Tabel 2. Uji variabel kualitas aparatur daerah

	(1)	(2)	(3)	(4)	Total
N.1	1				
N.2	0,364**	1			
N.3	0,547**	0,496**	1		
N.4	0,280*	0,481**	0,342**	1	
Total	0,726**	0,760**	0,800**	0,716**	1

Keterangan : * Sig < 5%, **Sig < 1%

Tabel 3. Uji reliabilitas variabel

Variabel	Cronbach's alpha
Kualitas Aparatur Daerah (KAD)	0,737
Kepatuhan Pada Regulasi (KPD)	0,775
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	0,910
Sistem Informasi (SI)	0,873
Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD)	0,929

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koef. Beta	P value	Hasil
KAD → PBMD	-0,267	0,039*	H1: ditolak
KPD → PBMD	0,661	0,001*	H2: didukung
SPI → PBMD	0,456	0,000**	H3: didukung
SI → PBMD	0,899	0,000**	H4: didukung
F hitung: 41,493		0,000**	
Adj R Square: 0,723			

Keterangan: ** sig < 1%, * sig < 5%

Pengelolaan barang milik daerah akan terwujud apabila ada pengendalian internal berjalan dengan baik (Feng, Li, McVay, & Skaife, 2015). Pengendalian yang baik memiliki efek signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan termasuk didalamnya pengelolaan barang milik daerah (Feng et al., 2015). Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah untuk menekan angka fraud yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga manajemen aset dapat terwujud mengikuti regulasi yang berlaku (Sari, 2014). Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen aet daerah maka barang (aset) negara akan terjaga dan pelaporan keuangan semakin berkualitas (Ekayanti, Rifa, & Irwan, 2018).

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap penelolaan barang. Hal ini dikarenakan pengetahuan akan sistem informasi dan tingkat pendidikan responden cukup matang serta mendukung dalam pengoperasian aplikasi dengan jaringan internet. Sistem informasi yang berkualitas tentu mendukung pengelolaan barang dan mempermudah auditor untuk mengevaluasi implementasi manajemen aset daerah. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi permasalahan maupun hambatan sebuah aplikasi (Sulistiawati, 2016). Sistem informasi membantu proses inventarisasi data aset sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pelaporan pengelolaan barang milik daerah. Sistem informasi juga mempermudah proses input data dalam aplikasi SIMAS dan SIMPERSADA yang diterapkan oleh puskesmas (Gaffar, Hasanuddin, & Kusumawati, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas aparatur daerah berdampak negatif pada manajemen pengelolaan aset daerah. Kepatuhan pada regulasi, sistem pengendalian internal, dan sistem infomasi berpengaruh positif terhadap pengelolaa barang milik daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: (1) penelitian ini menggunakan responden yang kurang lengkap karena jumlah responden yang ditentukan tidak semuanya mengisi sesuai dengan jumlah jabatan yang disyaratkan. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi terhadap objek penelitian supaya lebih detail informasi yang dibutuhkan serta dokumen yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya lebih detail dan memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian selanjutnya (Azhar et al., 2013). (2) Penelitian ini kurang mencantumkan faktor P3 (Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pembinaan). Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor lain yang berpengaruh pada pengelolaan barang milik daerah seperti: perencanaan, pengadaan, penggunaan, peneliharaan, pemanfataan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta mengacu pada permendagri nomor 16 tahun 2016 tetang pengelolaan barang milik daerah (Rahmawati et al., 2020).

REFERENCES

Arnan, R. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan aset/barang milik daerah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10(2), 189–197.

Astini, Y. (2018). Kualitas aparatur, sistem informasi, sistem pengendalian intern, dan efektivitas manajemen aset tetap. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 173. https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p10

Azhar, I. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 1(1), 49–61.

Azhar, I., Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset (Studi pada SKP Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Akuntansi, 2(1), 15–26.

Belo, B.R., Asnawi, M., & Anthonius H. Citra W. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderating. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Bharranti;, R.E.R. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen terhadap manajemen aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua). Jurnal Keuda, 2(1), 1–16.

Budiarto, D.S., Setyaningrum, A.D., & Sari, R.P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 145–159. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240

Darno. (2012). Analisis pengaruh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ekayanti, S.M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants effectiveness fixed asset management of District Government on the Island of Lombok. Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER), 9(1), 1219–1229.

Fathiyah. (2018). Perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas "X" berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 6(74), 15–20.

Feng, M., Li, C., McVay, S. E., & Skaife, H. (2015). Does ineffective internal control over financial reporting affect a firm's operations? Evidence from firms' inventory management. Accounting Review, 90(2), 529–557. https://doi.org/10.2308/accr-50909

Gaffar, I., Hasanuddin, B., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh inventarisasi aset, sumber daya manusia terhadap optimalisasi aset dengan sistem informasi sebagai variabel moderasi. Jurnal Analisis, 6(2), 164–172.

Hidayat, N. Al, Juniarsih, D., Chotib, M., & Mardiansyah, A. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah No . 27 tahun 2014 dalam mewujudkan tertib administrasi barang milik Daerah. Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora, 2(2), 46–55.

Hidayati, S. N. R. (2016). Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset RSUD Pandan Arang Boyolali. Jurnal EMBA, 11(November), 33–51. https://doi.org/10.3390/rs9070665

Indah, D., Abdullah, S., Junita, A., & Fahlevi, H. (2017). Kajian kepatuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh (Studi kasus pada Dinas Kesehatan). Jurnal Manajemen Dan Keuangan Unsam, 6(1), 627–637.

Kolinug, M.S., Ilat, V., Pinatik, S., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Analysis of management fixed assets at departement of revenue finance and assets management Tumohon. Jurnal EMBA.ISSN 2303-1174, 3(1), 818–830.

Muna, B. N., & Haris, L. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 6(1), 35–44. https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.809

Nancy. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis, 3(2), 160–172.

Niu, F.A.L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8(2), 160–170. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842

Oktaviana. (2010). Pengelolaan aset daerah berkaitan opini disclaimer BPK di Kabupaten Toja Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007. Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta, (X), 139–158.

Pratiwi, W. (2012). Analisis penerapan sistem pengendalian intern (Studi kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo), XII(2), 82–104.

Rahmawati, A., Dewi, K., Nugraheni, A. P., & Tidar, U. (2020). The management of assets / regional owned goods in labor department of Magelang city. Jurnal Ilmiah MEA, 4(3), 761–776.

Sari, S. P. (2014). Keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi, (Sancall), 418–425.

Scott, W.R. (2015). Financial Accounting Theory, Seventh Edition, University of Waterloo, Pearson

Stigler, G. J. (2012). Regulation of economic The theory, The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 2–21.

Subrata, I.W., Yasa, G.W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 2, 477. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i02.p07

Sulistiawati, E. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan peranan pimpinan sebagai variabel moderating, Tesis, Magster akuntansi, Universitas Sumatera Utara.

Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A.K. (2018). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(1), 1–14. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27636

Yunita, I., & Devitra, J. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset pada SMK Negeri 4 Kota Jambi. Jurnal Manajemen Sistem Informasi, 2(1), 278–294.

Zelmiyati, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 7(1), 11–21.